

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat adalah negara adidaya pemenang perang dunia kedua, sebagai negara pemenang Amerika Serikat memiliki hak untuk mengatur keamanan di dunia mengatasnamakan Dewan Keamanan. Kemenangan dalam perang membuat Amerika memiliki hak veto dalam menentukan kebijakan keamanan internasional, salah satunya pelarangan perakitan nuklir sebagai senjata. Kebijakan Amerika Serikat dalam melimitasi perakitan nuklir disebabkan atas bahaya yang ditimbulkan oleh nuklir ketika perang dunia berlangsung.

Energi Nuklir merupakan energi hasil dari sebuah proses kimia yang dikenal dengan reaksi fisi dan reaksi fusi pada sebuah inti atom ada dua tujuan pembuatan nuklir yakni sebagai pembangkit listrik dan sebagai senjata. Nuklir sebagai pembangkit listrik merupakan energi masa depan yang dibutuhkan dalam berbagai keperluan rumah tangga, industri, penerangan, dan lain-lain. Penggunaan uranium dalam reaktor nuklir dinilai aman dan ekonomis untuk memproduksi listrik sebagai contoh 1 uranium mempunyai kandungan energi setara dengan 150 kg batubara¹. Nuklir sebagai senjata, merupakan dualisme kepemilikan nuklir yang dikhawatirkan banyak pihak karena dapat menjadi ancaman negara lain. Ketika melakukan program pembangkit listrik oleh tenaga nuklir dapat pula membuat bom nuklir sebagai senjata seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada Perang Dunia

¹F.P. Sagala dkk, BATAN Model Atom dan Prospeknya sebagai Energi Masa Depan, (Jakarta: Mei 2003) 13-17

kedua dan digunakan untuk pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang yang mengakibatkan rakyat sipil terluka dan meninggal dalam sekejap saat bom atom dijatuhkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat di Hiroshima dengan perangkat yang dinamakan "*Little Boy*". Kejadian yang sama terjadi di Nagasaki oleh bom atom yang dinamakan "*Fat Man*". Parahnya, dalam hitungan bulan dan tahun setelah pemboman dahsyat itu ribuan orang meninggal akibat radiasi nuklir, efek yang berkepanjangan dan dapat memusnahkan tumbuhan yang paling berbahaya dari pencemaran radioaktif seperti nuklir adalah radiasi sinar alpha, beta dan gamma yang sangat membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Selain itu partikel-partikel neutron yang dihasilkan juga berbahaya.

Dengan adanya permasalahan terkait nuklir yang diproduksi sebagai senjata membuat Negara-negara dan komunitas internasional terancam dan sepakat untuk membentuk rezim yang dapat menahan perkembangan nuklir sebagai senjata. *Non Proliferation Treaty* (NPT) adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran teknologi senjata nuklir dan senjata, untuk mempromosikan kerja sama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dan untuk mencapai tujuan mencapai pelucutan senjata nuklir dan pelucutan senjata secara keseluruhan dan lengkap. Perjanjian tersebut merupakan satu-satunya komitmen yang mengikat dalam sebuah perjanjian multilateral terhadap tujuan pelucutan senjata oleh negara-negara senjata nuklir. Dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1968, Perjanjian mulai berlaku pada tahun 1970². NPT menetapkan aturan mengenai kepemilikan senjata nuklir, baik bagi negara yang memiliki

² United Nation, "Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)", <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>, diakses pada 11 Januari 2017

senjata nuklir juga bagi negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Bagi negara yang memiliki senjata nuklir dilarang mendistribusikan senjata nuklir tersebut kepada negara-negara yang tidak memiliki nuklir. Selain itu, dalam NPT ini juga terdapat kesepakatan antar negara-negara yang memiliki nuklir seperti Amerika, Inggris, Rusia, Tiongkok, serta Prancis untuk mengurangi kepemilikan senjata nuklir, hingga lambat laun dapat menghilangkan senjata nuklir tersebut dari muka bumi. Pada negara-negara non-nuklir terdapat larangan untuk tidak menciptakan dan mengembangkan senjata nuklir. Sedangkan bagi negara-negara yang memiliki energi nuklir yang kemudian dimanfaatkan sebagai industri, teknologi, tenaga pembangkit atau untuk *peaceful nuclear energy* diperbolehkan untuk mengembangkannya, namun kemudian harus bersedia untuk membuka negaranya akan adanya inspeksi-inspeksi dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA), serta mentaati aturan perlingkungannya yaitu IAEA *Safeguards*. Peraturan-peraturan tersebut berlaku bagi seluruh negara yang telah menandatangani NPT. Pada akhir tahun 1997, negara yang bergabung dalam NPT berjumlah 180 negara non-nuklir, serta 5 negara awal pemilik nuklir yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Prancis³.

Kelima negara tersebut dijadikan dewan keamanan PBB dan menjadi *Nuclear Weapon States* (NWS) Dalam perjanjian tersebut kelima negara NWS telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-NWS, kecuali untuk merespon serangan nuklir atau serangan konvensional yang bersekutu dengan negara NWS. Di Timur Tengah Iran ikut serta dalam

³ Jones, Rodney W. et al. 1998. Tracking Nuclear Proliferation: A Guide in Maps and Charts. Washington DC : Carnegie Endowment for International Peace, hlm. 15

meratifikasi Perjanjian Nonproliferasi Nuklir namun Iran menyatakannya ketertarikan dalam pengayaan nuklir.

Namun pada kepemimpinan George Walker Bush (2001-2009) Amerika digemparkan dengan program nuklir yang dijalankan Iran, Iran menyatakan aktifitas pengembangan nuklir bertujuan damai yakni sebagai sumber energi alternatif dan isotop kesehatan. Namun dengan adanya peristiwa pengeboman *World Trade Center* 11 September 2001 Amerika Serikat seolah melihat program nuklir Iran adalah ancaman bagi keamanan internasional.

Pada tahun 2003 IAEA menyatakan bahwa mereka menemukan pabrik uranium berkadar tinggi di Natanz, Iran. Produksi uranium Iran sempat dihentikan, namun pada tahun 2006 Iran kembali memproduksi setelah mengadakan perjanjian dengan IAEA⁴. Kecaman dan deretan resolusi sanksi dijatuhkan dari Dewan Keamanan PBB yang dimotori oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Iran dikenakan sanksi internasional untuk menghentikan aktifitas nuklirnya sementara, sanksi tersebut termasuk juga sanksi ekonomi sebagai balasan atas ketidakpatuhannya berulang kali Iran mendapat ancaman kekuatan militer. Situasi tersebut tidak membuat Iran mundur, atas nama hak nasional bangsa Iran program nuklir terus dikembangkan tanpa bantuan dari Amerika.

Presiden Iran periode Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) memiliki fokus pada masalah dalam negeri menilai apabila memiliki nuklir sebagai tenaga pembangkit listrik akan sangat menguntungkan. Dengan langkah kongkrit

⁴ CNN International, "10 Fakta Mengenai Nuklir Iran", dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140922155915-120-3985/10-fakta-mengenai-nuklir-iran/>, diakses pada 5 Februari 2017

Ahmadinejad mendirikan pengayaan uranium di Isfahan untuk upaya peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan yang terjadi di Iran. Proyek nuklir yang digagas mengalami peningkatan pesat, banyak anak muda Iran menyatakan ketertarikan dalam berkontribusi dengan memilih jurusan nuklir sebagai bidang studi.

Pada 4 Februari 2006 IAEA sepakat untuk melaporkan kegiatan nuklir Iran kepada Dewan Keamanan PBB, Keputusan ini diambil oleh IAEA dengan alasan khawatir kegiatan nuklir Iran bukan untuk tujuan perdamaian. Walau pemerintah Teheran menyatakan pengayaan uranium untuk pembangkit tenaga listrik, negara-negara Barat tetap saja menuding Iran bermaksud membuat senjata nuklir. Sementara Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad tak peduli dengan reaksi Barat⁵.

Memasuki tahun kepemimpinan Presiden Obama (2009-2013) pencapaian kesepakatan mengenai nuklir dengan Iran masih menjadi tantangan bagi kebijakan luar negeri Amerika, walau tidak lagi memakai cara *hard power military* pada masa Obama sanksi yang dijatuhkan ternyata lebih ketat, dengan dukungan masyarakat Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungan dengan negara Timur Tengah termasuk Iran, Obama melakukan komunikasi bilateral dengan Presiden Iran Hassan Rouhani (2013) dan dimulainya jalur diskusi serta negosiasi.

Kesepakatan nuklir Iran dengan Amerika Serikat telah berhasil dicapai pada 14 Juli 2015 di Wina Austria, yang dinamakan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan dengan

⁵ Liputan 6, "IAEA Sepakat Melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB", dalam <http://global.liputan6.com/read/117095/iaea-sepakat-melaporkan-iran-ke-dewan-keamanan-pbb>, diakses pada 9 Januari 2017

kesepakatan tersebut adalah akhir dari jalur yang terputus dan menggandeng Iran adalah sebuah awal baru bagi dunia. Perundingan tersebut diikuti oleh Iran dan enam kekuatan dunia yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, Rusia dan Jerman yang dimulai pada tahun 2006⁶. Kelompok P5+1 menginginkan Iran mengurangi kegiatan nuklir yang merupakan isu peka untuk memastikan negara tersebut tidak bisa membuat senjata nuklir. Kesepakatan yang sangat bergantung pada persetujuan Amerika Serikat dan Iran tersebut, telah berlangsung secara intensif dan mengalami proses pasang-surut dan pembicaraan yang alot, yang sempat mengalami kebuntuan selama rentang waktu yang lam. Lambat laun Amerika melihat adanya keuntungan yang didapat apabila menyetujui program nuklir Iran tidak menganggapnya sebagai ancaman

Dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu apa yang membuat Amerika setuju terhadap penggunaan nuklir di Iran

B. Rumusan Masalah

Mengapa Amerika Serikat dapat menyetujui Perjanjian Program Nuklir Iran yang dinamakan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* pada 14 Juli 2015 setelah sekian lama menolak dan melarang nuklir Iran beroperasi?

⁶ BBC, "Dunia menyambut baik kesepakatan nuklir Iran", dalam http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150714_dunia_iran_nuklir_reaksi, diakses pada 10 Januari 2017

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah mengungkapkan kepentingan Amerika Serikat dalam menyetujui *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) pada tahun 2015 dengan Iran dan alasan dibalik perjanjian tersebut dilakukan.

D. Kerangka Teoritik

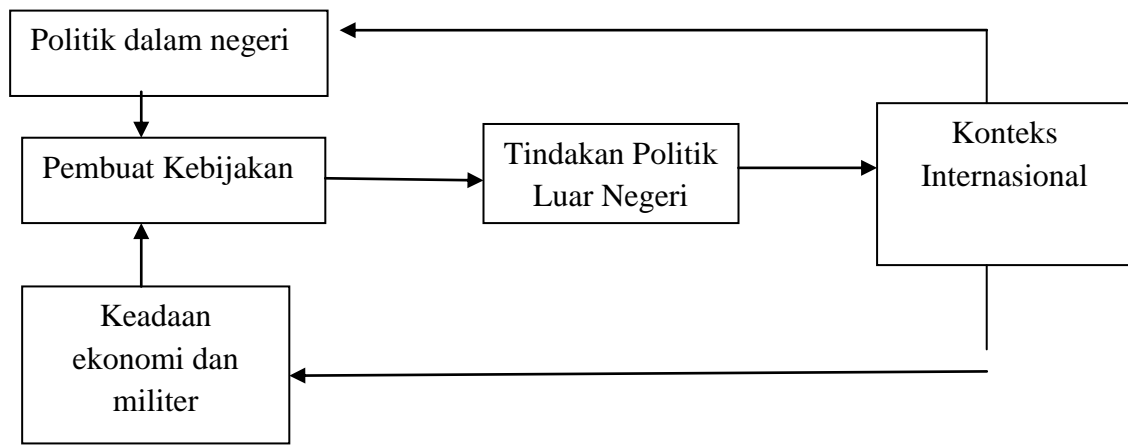
Teori dapat menggabungkan serangkaian konsep menjadi satu penjelasan yang dapat menunjukkan bagaimana konsep-konsep secara logis dan saling berhubungan. Untuk menjawab pertanyaan mengapa Amerika dapat menyetujui perjanjian Nuklir Iran tahun 2015 dengan mengulik isi pembuatan keputusan luar negeri yang penulis gunakan adalah Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri oleh William D. Coplin. Menurut William D. Coplin dalam bukunya Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga aspek pertimbangan yaitu kondisi politik dalam negeri, kapabilitas ekonomi dan militer dan konteks Internasional⁷. Berikut merupakan model teori pengambilan keputusan luar negeri:

⁷ Coplin, W. D. (1992), "Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis (Introduction to international politics: a theoretical overview)", Bandung: Sinar Baru.

Penulis akan menggunakan model proses pengambilan keputusan luar negeri agar dapat menjelaskan keputusan politik luar negeri Amerika

Bagan 1.1

Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri Menurut William D. Coplin



1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Coplin menjelaskan bahwa keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang didalamnya melibatkan berbagai aktor politik yang juga mempunyai kepentingan tertentu. Para aktor politik tersebut disebut sebagai “*policy influencer*” yaitu para pendukung rezim tertentu dalam suatu pemerintahan negara dan rezim tersebut membutuhkan dukungan untuk menguatkan legitimasinya⁸.

Pasca tragedi 9/11 Presiden Bush semakin menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin negara adidaya. Bush menerapkan doktrin *pre-emptive strike*,

⁸ Coplin, W. D. (1992), “Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis (Introduction to international politics: a theoretical overview”, Bandung: Sinar Baru.

yakni melakukan penyerangan terhadap musuh sebelum musuh melakukan ancaman dan mengambil tindakan lebih. Doktrin *pre emptive strike* tersebut merupakan doktrin yang diusung oleh Presiden Bush beserta tokoh-tokoh Neo-konservatif Amerika yang berpandangan uniteralisme, tokoh-tokoh tersebut diantaranya Wakil Presiden Dick Cheney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, Richard Perle sebagai Kepala Dewan Kebijakan Pertahanan, dan Wolfowitz sebagai Wakil Menteri Pertahanan⁹.

Amerika Serikat memakai sistem dua Partai Politik. Partai Republik di sayap kanan yang berhaluan konservatif dan Partai Demokrat di sayap kiri yang berhaluan liberalis. Dalam memformulasikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ketika dipimpin oleh Presiden dari Partai Republik tidak terlepas dari peranan pemikiran kelompok Neo-konservatif Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri yang unilateralis dengan mengutamakan dominasi militer merupakan ciri khas dari kelompok Neo-konservatif¹⁰. Kelompok Neo-konservatif mulai berkembang pada 1917 dipelopori para pemikir alumni Universitas Yale yang kini disebut dengan *Skull and Bone*¹¹. Sejak awal berkembangnya Neo Konservatif dipengaruhi oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki pengaruh dalam ekonomi Amerika Serikat seperti *Standart Oil*, *Brown Brothers*, *Harriman Banking*, *Halliburton*, dan *Manhattan*.

⁹ Hamzah, Alfian & Musa Kazhim 2007, *Perang Dunia III di Pelupuk Mata Iran Skenario Penghabisan*, Cahaya Insan Suci, Jakarta

¹⁰ Anwar, Dewi Fortuna, "Tatatanan Dunia Baru di Bawah Hegemoni Amerika Serikat", *Jurnal Demokrasi dan HAM* Vol. 3, No. 2, Mei-September 2000, hlm. 7-28

¹¹ Hendraji, dkk 2010, *Tangan tangan Amerika "Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia"*, Global Future Institute, Jakarta

Tujuan dari kelompok Neo-konservatif adalah untuk mempertahankan dominasi Amerika Serikat diseluruh dunia dengan segala cara¹², dengan visi utama kelompok Neo-konservatif AS pasca Perang Dingin adalah menjaga ketertiban dunia dengan mempertahankan hegemoni Amerika Serikat terutama keunggulan militernya serta mencegah negara lain untuk membangun kemampuan yang dapat menyaingi hegemoni Amerika Serikat, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Eropa Barat, Asia Timur, wilayah bekas Uni Soviet dan Asia Barat Daya. Hal ini yang menyebabkan para tokoh Neo-Konservatif memilih untuk bertindak secara uniteralisme dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya¹³. Kelompok inilah yang dapat menggerakkan Presiden Amerika dari Partai Republik sebagai kelompok yang berpengaruh dan kuat, Neo-Konservatif dianggap sebagai kelompok fundamentalis yang dapat memformulasikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, termasuk pada kasus Nuklir Iran.

Sedangkan di sayap kiri Partai Demokrat dipahami sebagai koalisi kelompok sosial yang kepentingannya dilayani oleh berbagai bentuk kegiatan pemerintah. Sebagian besar Demokrat kurang berkomitmen pada prinsip liberalisme, ia lebih berfokus pada perumusan program pemerintah yang mencakup kepentingan rakyat. Konstituensi yang beraliansi dengan demokratik membuat tuntutan konkrit yang mewakili kepentingan sosial masyarakat yang seringkali kali berkompromi untuk mendapatkan pencapaian tujuan mereka secara parsial. Berbeda dengan Partai Republik, Demokrat tidak memiliki gerakan

¹² Yuliantoro, NurRachmat 2005, "Hegemoni Amerika Pasca 11/0: Menuju Sebuah Imperium Amerika Baru ?", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) Universitas Gadjah Mada, Vol. 9, No.1, Juli, hlm.79

¹³ Anwar, Dewi Fortuna, "Tatatanan Dunia Baru di Bawah Hegemoni Amerika Serikat", Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003, hlm.17

internal kuat yang dirancang untuk menerapkan disiplin ideologis pada pejabat terpilih, Partai Demokrat memberi lebih banyak kebebasan kepada para pemegang jabatan. Perwakilan Partai Demokrat hanya fokus untuk melakukan manuver secara pragmatis yang dapat membantu Amerika Serikat mendapatkan untung dari setiap kebijakan yang dilakukannya. Partai Demokrat membantah bahwa partai tersebut memiliki filosofi yang sama untuk mengarahkan tindakan pemegang kekuasaan, apabila Partai Republik memiliki filosofi yang sama Partai Demokrat bedasarkan kepercayaan kelompok sosial, yang terpenting bagaimana perwakilannya tersebut dapat memenuhi keinginan sebagian besar masyarakat¹⁴.

Selain pengaruh Neo Konservatif, dalam mengambil kebijakan Berikut adalah *stake holder* yang mempunyai andil dalam mengambil keputusan luar negeri Amerikat Serikat; Presiden, Kongres, *Central Intelegence Agency* (CIA), Kelompok kepentingan yang didalamnya ada *human rights watch, amnesty internastional, rotary international, the zionist organization. The roman catholic cruch, the brookings institution*, serta kelompok-kelompok etnis dan Cina, Jepang, Polandia, Perancis, dan lain-lain. Dua kelompok kepentingan terkemuka adalah Lobi Yahudi dan Lobi Tiongkok. Bila Lobi Tiongkok selalu mengusahakan agar memasukan unsur komunis komunis, maka Lobi Yahudi selalu menekan pemerintah Amerika Serikat agar menjalankan politik luar negeri yang menguntungkan Israel¹⁵.

¹⁴ Matt Grossmann and David A. Hopkins, " Ideological Republicans and Group Interest Democrats: The Asymmetry of American Party Politics", dalam <http://www.matthewg.org/ideologicalrepublicans.pdf>, diakses pada 1 Juni 2017

¹⁵ Cipto Bambang(2003), Politik dan Pemerintahan Amerika, Lingkaran, Yogyakarta, hlm.207-208

2. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi posisi tawar (*bargaining position*) dimata negara lain. Kemampuan ini juga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Dua kekuatan ini merupakan unsur penting karena merupakan salah satu unsur dari kapabilitas negara untuk menjamin kepentingan nasionalnya dan mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan kepada negara lain. Semakin baik perekonomian dan militernya, maka akan semakin mampu menyeimbangkan antara kapabilitas dengan kepentingan nasionalnya¹⁶.

Dengan berakhirnya Perang Dingin yang menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adidaya fokus dunia beralih kearah tradisional isu seperti terorisme. Padahal 11 September 2001 dunia digemparkan dengan serangan bom yang meruntuhkan gedung *World Trade Center* dan merusak markas Departemen Pertahanan di Pentagon Amerika Serikat oleh jaringan teroris Al-Qaeda di Afghanistan. Presiden George Walker Bush mengumumkan perang dengan teroris yang kemudian dikenal dengan ‘Doktrin Bush’ membuat perubahan kebijakan perpolitikan Amerika Serikat pada saat itu. Pada Kongres Amerika Serikat Presiden Bush dengan tegas mengatakan, “*either you with us or you with with the terroris*”, Bush juga menegaskan bahwa, “*if you are not with us, you are againts us*”¹⁷. Dunia kemudian dipaksa menjadi dua golongan pro teroris atau pro Amerika, kebijakan politik dunia berubah haluan dan apabila negara ingin bekerja

¹⁶ Coplin, W. D. (1992). Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis (Introduction to international politics: a theoretical overview). Bandung: Sinar Baru.

¹⁷ Kavoori P Anandam & Tood Freley (2006), “Media, Terrorism, and Theory: A Reader”, Rowman&Littlefield Publisher Inc, USA.

sama dengan Amerika maka negara tersebut harus mengikuti dan patuh terhadap kebijakan Amerika Serikat.

Sejak pertengahan 2005 Presiden George W Bush telah beberapa kali melakukan pembicaraan mengenai serangan militer ke Iran. misalnya, Presiden Bush bekerjasama dengan Israel dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dalam bidang militer untuk merencanakan perang nuklir terhadap Iran. Invansi yang dilakukan awalnya menuai simpati dunia apalagi dengan dukungan dari negara NATO yang membantu Amerika namun perkiraan banyaknya korban sipil tidak bersalah membuat dunia mengecam invansi ini.

Isu hak asasi manusia berulang kali dituduhkan oleh pengamat politik internasional pada Amerika Serikat yang tidak jarang melakukan invansi dengan kekuatan militer, ide hak asasi manusia yang awalnya digagas oleh Amerika seolah hanya menjadi alat politik untuk mencapai kepentingan nasional pada negara lain Amerika Serikat yang semula dianggap pahlawan perang dunia kedua dan perang dingin berubah menjadi penjahat perang yang menyerang masyarakat sipil demi kepentingannya. Terpilihnya Presiden Barack Obama dari Partai Demokrat pada pemilu 2008 membuat perubahan yang signifikan menjadi awal dari perubahan-perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Arah kebijakan luar negeri yang semula sangat kental dengan unsur-unsur militeristik dibawah kepemimpinan Presiden Bush dari Partai Republik, berubah drastis menuju ke arah isu-isu kerjasama di segala bidang dalam menjalan hubungan luar

negeri dengan negara-negara lainnya di bawah kepemimpinan Obama¹⁸. Hal ini yang dilakukan oleh Amerika yang dipimpin oleh Barrack Obama kepada Iran, pendekatan militeristik yang dilakukan Bush tidak lagi dilakukan pada era Obama, Obama ingin menampilkan citra bahwa Amerika adalah negara adidaya yang bersahabat, menjunjung demokrasi.

Perubahan tersebut mempengaruhi sikap Amerika terhadap Iran terkait Nuklir, seperti yang diketahui bahwa Amerika sebagai salah satu Dewan Keamanan PBB tidak menyetujui kepemilikan nuklir yang dilakukan Iran, ancaman dan tekanan dari segala aspek telah dilakukan namun tidak menghentikan Iran.

3. Konteks Internasional

Konteks Internasional merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Elemen geografis, ekonomis dan politis merupakan tiga elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks Internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Biasanya suatu kejadian tertentu yang berkembang dalam dunia Internasional akan mempengaruhi tindakan politik, ekonomi serta kepentingan suatu negara terhadap negara lain¹⁹.

Pada aspek geografis Iran merupakan negara di Timur Tengah yang berpengaruh karena mempunyai program nuklir, yang walaupun Presiden Ahmadinejad menegaskan bahwa program nuklir bertujuan damai sebagai sumber daya dan tidak menggunakannya sebagai pemusnah masal namun Amerika tidak

¹⁸ Carter G Ralph (2014), "Contemporary Cases in US Foreign Policy: From Terrorism to Trade", SAGE Publications Ltd, United Kingdom

¹⁹ Coplin, W. D. (1992). Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis (Introduction to international politics: a theoretical overview). Bandung: Sinar Baru.

percaya dan menekan Iran untuk menghentikan program nuklir hingga membawa isu nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB dan menjatuhkan beberapa sanksi Iran terus mengembangkan program nuklirnya²⁰.

Program nuklir Iran yang disinyalir untuk memperkuat militer dengan memproduksi senjata dikhawatirkan sebagai ancaman di Timur Tengah. Sebagai penganut unilaterisme Amerika Serikat tidak mendukung pihak yang tidak menjadi sekutunya dan dengan jelas mengganggu kepentingan nasional Amerika Serikat di Iran, ditambah Israel selaku sekutu Amerika menentang pengembangan nuklir Iran. Untuk mengawasi hal tersebut, maka Amerika menerapkan kebijakan standar ganda mengenai nuklir. Standar ganda tersebut dengan membantu pengembangan senjata nuklir milik India, Pakistan, dan Israel yang pada dasarnya tidak terdaftar dalam perjanjian NPT dan badan IAEA²¹.

Hal ini dikritik oleh negara-negara lain, dengan keterlibatan Amerika yang menyerang Iran bersama sekutu-sekutunya dengan ancaman bahkan sanksi tapi tidak berlaku pada India, Pakistan, dan Israel yang dapat mengembangkan program nuklirnya. Pada faktor ekonomis dan politis, Iran merupakan lumbung minyak bagi Amerika, sebelum adanya Revolusi Iran yang mengubah peta perpolitikan Iran, karena tanpa disadari kerjasama tersebut merugikan rakyat Iran dan ulama. Amerika yang mendapat tekanan negara lain dan internasional mengalami prediksi merugikan apabila Amerika tetap bersikeras menolak program nuklir Iran, karena alasan yang digunakan Amerika bahwa nuklir Iran

²⁰ Sakinah, Desti Nur (2006), *Kepentingan Iran Mengembangkan Kembali Program Nuklirnya*, Pascasarjana Universitas Indonesia hlm 86

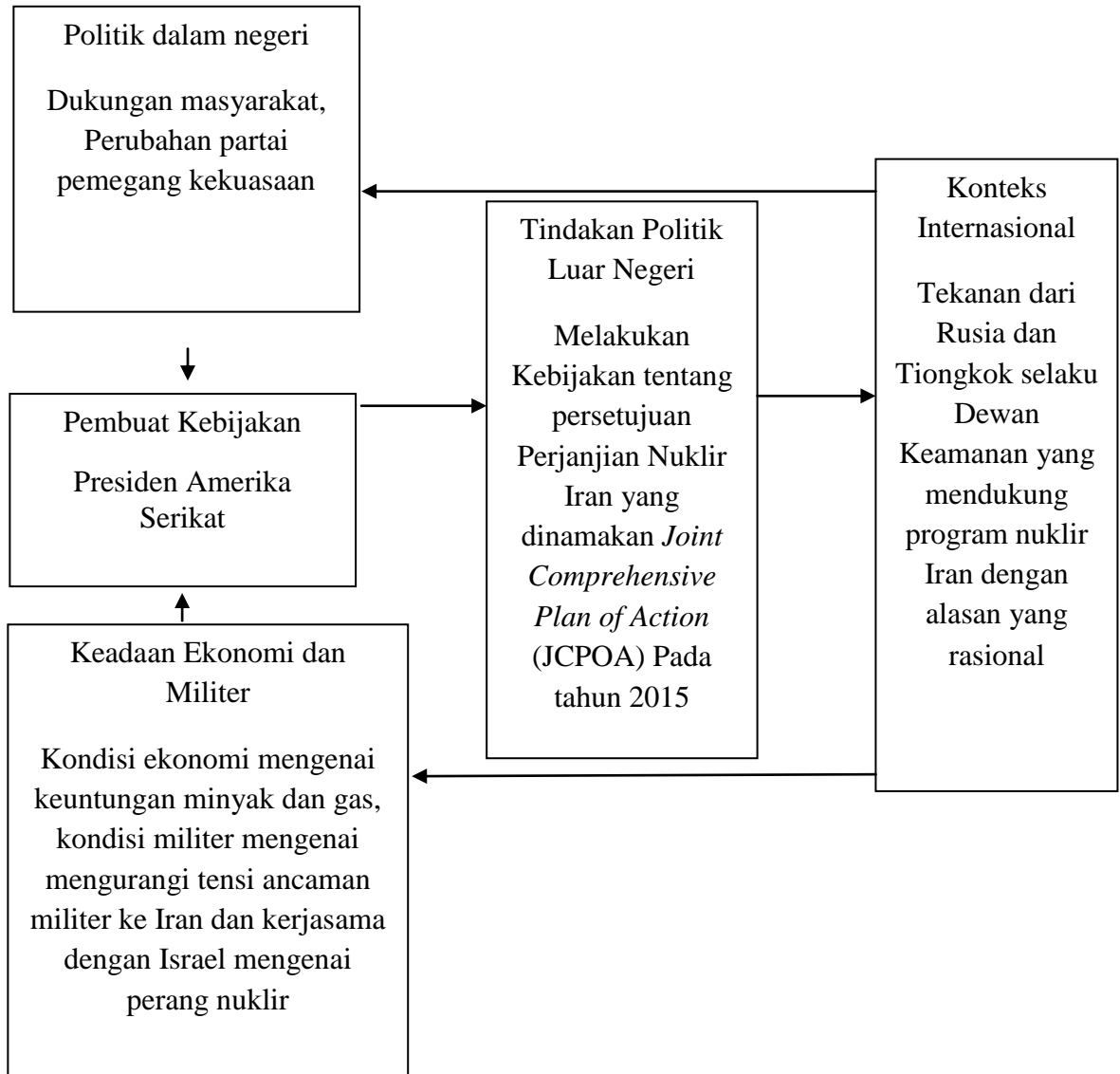
²¹ Winingsih, Sri (2009), *kebijakan luar negeri amerika serikat terhadap pengembangan nuklir iran*, tesis pascasarjana universitas indonesia

membahayakan dapat dipangkas tuntas dengan adanya kontrol ketat dari IAEA dan negara anggota Dewan Keamanan PBB.

Lebih lanjut Amerika akan menghadapi kekuatan besar Timur Tengah yang dendam dan ingin membuat nuklir dengan tanpa diawasi oleh Amerika yang dalam hal ini akan menjadi timbul satu kekuatan dunia baru yang dapat meyaingi Rusia. Dengan kondisi Timur Tengah yang sedang panas, bukan tidak mungkin akan terjadi perang koalisi yang akan terjadi, Amerika harus dapat melihat kemungkinan terburuk tersebut. Konflik ekonomi terkait minyak ini mempengaruhi pada kebijakan politik Amerika yang ditekan oleh sekutunya Israel, Israel melihat Iran sebagai ancaman dari segala bidang di Timur Tengah, karena dengan di teruskannya program nuklir Iran memperkuat *bargaining position* Iran di Timur Tengah. Iran akan menjadi negara yang dipercaya di kawasan Timur Tengah dan menjadi negara yang diperhitungkan dengan kebangkitan ekonomi dan kekuatan militernya.

Bagan 1.2

Interaksi antar faktor dalam Proses Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri menurut William D.Coplin



E. Hipotesa

Amerika Serikat dapat menyetujui Perjanjian Program Nuklir Iran yang dinamakan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) pada 14 Juli 2015 karena berdasarkan latar belakang dan kerangka dasar teoritik yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik sebuah hipotes bahwa;

- a. Pada aspek kondisi dalam negeri Amerika Serikat dapat menyetujui JPCOA karena adanya perubahan pemegang kekuasaan Presiden Bush dari Partai Republik ke Presiden Obama dari Partai Demokrat
- b. Pada aspek kondisi ekonomi Presiden Obama ingin menguatkan citra negara adidaya yang dapat dipercaya dengan menerapkan sitem kerjasama yang lebih menguntungkan untuk Amerika Serikat
- c. Pada aspek konteks internasional Amerika Serikat ingin menghilangkan pengaruh negara-negara lain dalam pengembangan Program Nuklir Iran khususnya Rusia dan Tiongkok
- d. Pada aspek militer Amerika Serikat ingin menguasai Iran seperti sebelum tahun 1979 dengan mengurangi tensi ancaman militer

F. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisa eksplanatif. Fenomena yang akan penulis teliti adalah kepentingan amerika dalam Perjanjian Nuklir Iran JCPOA pada tahun 2015. Data literatur yang relevan dan dapat di gunakan berupa jurnal, buku, diktat kuliah dan

artikel berita. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori pembuatan keputusan luar negeri yang telah dijelaskan diatas. Penulis yakin metode tersebut sangat efektif untuk mendukung argumen penulis

G. Jangkauan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memenuhi sistematika maka jangkauan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas nuklir, perjanjian NPT, keinginan Iran untuk mengembangkan nuklir, ketakutan Amerika Serikat dan penentangan Amerika Serikat dalam pengembangan nuklir Iran dari tahun 1967 sampai pada Amerika Serikat meyetujui Perjanjian Nuklir Iran JCPOA pada 14 Juli 2015 dengan segala kondisi.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pada bab ini penulis akan membahas tentang pendahuluan yang ada didalamnya yang terdiri dari tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab II : Pada bab ini penulis akan membahas tentang Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat tentang nuklir
- Bab III : Pada bab ini penulis akan membahas tentang Perkembangan Nuklir Iran
- Bab IV : Pada bab ini penulis akan membahas tentang Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam menyetujui *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* Pada Tahun 2015
- Bab V : Pada bab ini penulis akan membahas tentang kesimpulan